

STAKEHOLDER ANALYSIS DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI PROVINSI RIAU

Reski Lestari¹

Riant Nugroho²

Juwandi³

Syed Agung Afandi⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis^{1,3}

Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28714

Universitas Jenderal Achmad Yani²

Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota Cimahi, Jawa Barat 40531

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim⁴

Jl. UIN Suska, Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kabupaten Kampar, Riau 28293

Alamat email koresponden: reskilestari93@gmail.com

ABSTRAK

This research is motivated by the lack of studies that review watershed management policies, especially in Riau Province, studies on watershed management policies are minimal. In addressing watershed problems in Riau Province, a watershed management policy initiative has emerged. Stakeholders who propose the first watershed management policy by the Siak Watershed Forum regarding the Siak watershed management policy, and then present the policy initiative of the Riau Province DPRD Commission B regarding Watershed Management. The formulation of watershed management policies involves several stakeholders related to watershed management, namely Commission B of the Riau Provincial DPRD, Provincial and Regency / City SKPDs, the private sector and the Watershed Management Forum. This study aims to describe stakeholder analysis in the formulation of watershed management policies in Riau Province. This study uses qualitative research methods in order to gain an in-depth understanding of the phenomenon under study. Research data were obtained through in-depth interviews, observation, documentation and active participation. This research begins with the identification and formulation of problems, determining relevant data and subjects, selecting relevant data, collecting relevant data, analyzing data, drawing temporary conclusions and verification, and finally writing the research results.

Keywords: *Stakeholder Analysis, Policy Formulation, Watershed (DAS), Regional Regulations*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya studi yang mengulas tentang kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, terutama di Provinsi Riau kajian tentang kebijakan pengelolaan DAS sangat minim. Dalam menyikapi

persoalan DAS di Provinsi Riau muncul inisiatif kebijakan pengelolaan DAS. *Stakeholder* yang mengajukan Kebijakan pengelolaan DAS pertama oleh Forum DAS Siak tentang kebijakan pengelolaan DAS Siak, dan selanjutnya hadir kebijakan inisiatif Komisi B DPRD Provinsi Riau tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Perumusan kebijakan Pengelolaan DAS melibatkan beberapa *stakeholder* terkait Pengelolaan DAS, yaitu Komisi B DPRD Provinsi Riau, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Swasta dan Forum Pengelolaan DAS. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan *stakeholder analysis* dalam perumusan kebijakan pengelolaan DAS di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif guna memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Data peneliti diperoleh melalui *Indepth Interview*, observasi, dokumentasi dan partisipasi aktif. Penelitian ini diawali dengan identifikasi dan perumusan masalah, penentuan data dan subjek relevan, pemilihan data yang relevan, pengumpulan data yang relevan, analisis data, penarikan kesimpulan sementara dan verifikasi, dan terakhir penulisan hasil penelitian.

Kata Kunci: *Stakeholder Analysis*, Perumusan Kebijakan, Daerah Aliran Sungai (DAS), Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut dengan DAS merupakan satu kesatuan ekosistem hidrologi yang didalamnya terdapat keterkaitan dari bagian hulu dan hilir serta berbagai jenis sumberdaya alam yang saling mempengaruhi (C. Asdak.2010). Permasalahan DAS merupakan kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hal ini mengakibatkan penurunan kondisi DAS yang ditandai oleh peningkatan tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan, sehingga sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) Indonesia saat ini berada dalam keadaan kritis. Dengan otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, termasuk pengelolaan DAS dengan memperhatikan kesatuan DAS bagian hulu, tengah dan hilir.

Provinsi Riau memiliki empat Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Rokan, DAS Siak, DAS Kampar dan DAS Indragiri yang mencakup Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat dengan 13 kabupaten/kota dan 117 kecamatan (Laporan DPRD Provinsi Riau, 2014). Ekosistem wilayah DAS di Provinsi Riau dapat dibagi menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. Beberapa

permasalahan yang menunjukkan adanya pencemaran dan perusakan DAS yang berkaitan dengan DAS Indragiri, DAS Kampar, DAS Rokan, DAS Siak maupun Sub-sub DAS antara lain (Laporan Panitia Khusus, 2017):

1. Meningkatnya jumlah penduduk dan industri yang melakukan aktivitas atau kegiatan usaha dengan menghasilkan limbah di sepanjang DAS.
2. Berkurangnya tutupan hutan di DAS yang berfungsi sebagai daerah penyerap air karena alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pertanahan, perladangan, dan pemukiman.
3. Meningkatnya lahan kritis.
4. Serta meningkatnya erosi dan sedimentasi DAS.

Di Provinsi Riau perumusan kebijakan pengelolaan DAS tidak terlepas dari peran *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap DAS. Perumusan Kebijakan Pengelolaan DAS pertama diajukan pada tahun 2007 oleh forum DAS Siak yang mengajukan draft tentang pengelolaan DAS Siak. Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak, Prof. Adnan Kasry dipercaya menyusun draft rancangan Perda DAS Siak. Tahun 2014 draft tentang pengelolaan DAS diajukan kembali atas inisiatif Komisi B, raft yang diajukan tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Raperda inisiatif ini dipimpin Ketua Pansus DAS Riau Ir. Nurzaman. Dalam perumusan kebijakan pengelolaan DAS di Provinsi Riau terdapat beberapa *stakeholder* terkait pengelolaan DAS, *stakeholder* masing-masing berjalan sendiri-sendiri, kurang adanya koordinasi, komunikasi, serta sinergitas. Rancangan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis *stakeholder* dalam perumusan kebijakan Pengelolaan DAS di Provinsi Riau. Stakeholder terdiri dari Komisi B DPRD Provinsi Riau, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Swasta dan Forum Pengelolaan DAS. *Stakeholder analysis* memahami; Tingkat Ketertarikan *Stakeholders*, Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholders*, dan Identifikasi *Stakeholder*.

STAKEHODER ANALYSIS

Perumusan kebijakan sosial memiliki pengaruh secara langsung terhadap masyarakat, karena orang-orang yang terlibat dalam berbagai

tingkat proses perumusan sangat beragam. Sekelompok individu atau kelompok yang memiliki perhatian langsung maupun tidak langsung dalam sebuah hasil keputusan sosial disebut sebagai komunitas atau *stakeholders* kebijakan sosial (P. Edi Suharto, 2012). Aktor-aktor kebijakan berasal dari berbagai macam Lembaga yang mencakup dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur; Legislatur, Eksekutif, Lembaga peradilan, Kelompok penekan, Partai Politik, Media Massa, Organisasi Komunitas, aparat administrasi atau birokrasi, NGO, kelompok swasta, kelompok think tanks, dan Kabinet bayangan. Para aktor masing-masing mempunyai karakteristik yang menunjukkan kekuatannya mempengaruhi suatu kebijakan (S. Kusumanegara. 2010).

Para aktor masing-masing mempunyai karakteristik yang menunjukkan kekuatannya mempengaruhi proses kebijakan. Para aktor yang terlibat “penting” dalam proses kebijakan disebut pula sebagai elit kebijakan. Istilah elit menunjukkan pada pengaruh yang kuat dalam proses kebijakan. Berdasarkan pada analisis keputusan, aktor yang berkuasa adalah yang paling berhasil mengajukan inisiatif atau menentang usul-usul keputusan. Aberbach et.al. (1981) (S. Kusumanegara. 2010).

Stakeholders analysis dilakukan untuk memahami lingkup kelembagaan serta aktor yang terkait dan pemegang kunci kebijakan, yang menentukan jalannya suatu kebijakan pada tingkat formulasi. Stakeholder analysis menelaah interest dari pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan kebijakan dan memahami mana para pemangku kepentingan yang akan paling berpengaruh. Analisis ini berguna dalam memprioritaskan interaksi mereka dengan kelompok kepentingan utama, terutama yang terkena dampak langsung (Agustinus Subarsono, 2016). dalam melakukan *stakeholder analysis* digunakan metode *Power Grid* yang mengelompokkan stakeholder sesuai tingkat interest masing-masing.

Tabel 1
Power Grid Pemetaan Kepentingan

		Interest	
		Rendah	Dikelola
Power	Rendah	Dipuaskan	Dikelola

	Tinggi	Dimonitor	Dimonitor
--	--------	-----------	-----------

Stakeholder yang memiliki kepentingan besar tapi memiliki sedikit kekuasaan, perlu dikelola. Kelompok ini apabila digerakkan akan menjadi basis kekuatan dan mampu melakukan lobi. Mereka yang mempunyai kekuasaan besar, tapi memiliki kepentingan rendah, perlu dijaga agar puas dan perlu dijadikan patron atau pendukung kebijakan. Analisis power interest grid memberikan informasi tentang pemangku kepentingan yang paling kooperatif, berpengaruh, terlibat dan hanya menerima informasi, disamping informasi tentang orang-orang yang mungkin sulit untuk mencapai, menantang dan sulit terlibat (Agustinus Subarsono, 2016). Pengklasifikasian para pemangku kepentingan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan (*interest*) dan kekuatan atau pengaruh seperti *power* dan *influence* dalam Bryson (2004), Ackermann dan Eden (2011) dan Reed. (2009). *Interest* merupakan minat/kepentingan/kepedulian stakeholders dalam pengelolaan SDA. Sedangkan *power* adalah kekuatan/kemampuan/kewenangan/pengaruh *stakeholders* untuk melaksanakan (memengaruhi pelaksanaan) pengelolaan DAS (I. Alviya, dkk, 2017).

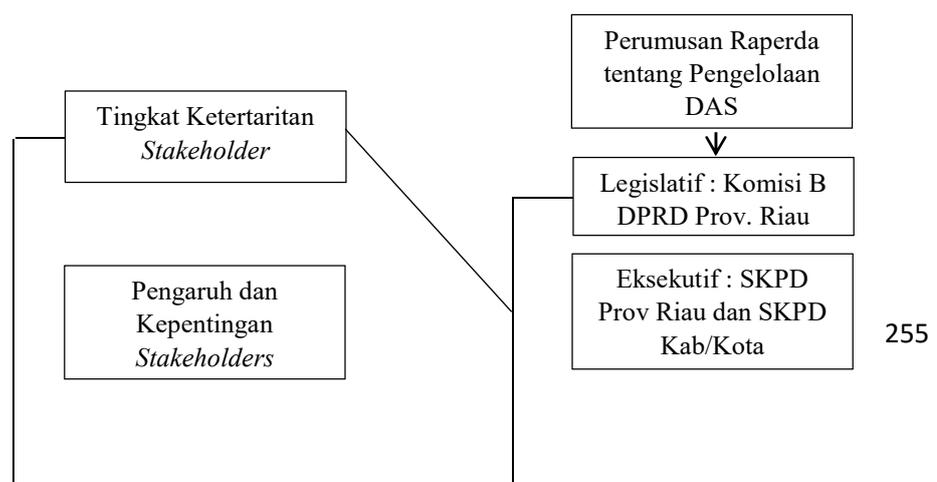
Dalam Nur tjahjawilasa dijelaskan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan adalah peningkatan integrasi dan kolaborasi di antara *key players, subjects dan context setters*. Pemberdayaan secara transparan dan berkeadilan dari para pemangku kepentingan yang termasuk di dalam crowds juga penting untuk mengedepankan peran positif para pemangku kepentingan di kelompok tersebut (N. Nurtjahjawilasa, dkk, 2015). Dalam hal in Stakeholder dikelompokkan menjadi; *High Interest – Low Power (subject)* merupakan *stakeholders* yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. Namun dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan stakeholders lainnya. *High Interest – High Power (Player)* merupakan *stakeholders* yang aktif

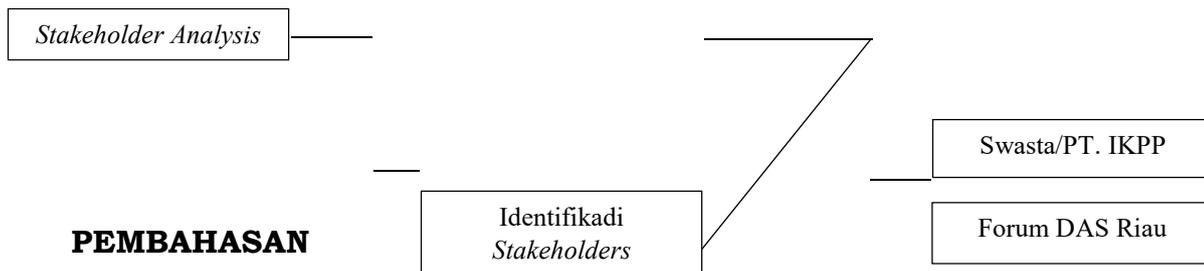
karena mereka mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek. *Low Interest – Low power (Context Setter)* memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit kepentingan, oleh karena itu, mereka dapat menjadi resiko yang signifikan untuk harus dipantau. *Low Interest – Low power (Crowd)* merupakan *stakeholders* yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan (A. Chairil Ichsan, 2017).

Analisis Stakeholders menurut Blackman terdapat beberapa tahapan yaitu: (R. Blackman, 2003):

1. Tingkat Ketertarikan *Stakeholders*;
2. Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholders*;
3. Identifikasi *Stakeholder*. Dalam Tsuraya Annisa Salsabila memaparkan analisis *stakeholder* pada;
 - a) Tingkat ketertarikan *stakeholders*; *stakeholders* dipisahkan berdasarkan *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder. *Stakeholders* primer dan sekunder kemudian dijelaskan ketertarikannya dan juga diberi penilaian prioritas.
 - b) Pengaruh dan kepentingan *stakeholder*; pada tahap ini *stakeholders* dipisahkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan kepentingan *stakeholders* mana yang lebih memiliki pengaruh dan kepentingan yang stabil.
 - c) Identifikasi *stakeholder*; pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi bagaimana setiap *stakeholders* berperan disetiap tahapan.

Bagan 1.1
Diagram Berfikir





PEMBAHASAN

Formulasi kebijakan Raperda Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat beberapa stakeholder, diantaranya Komisi B DPRD Provinsi Riau, Balai Pengelolaan DAS Kemenhut, Kemenkum HAM Provinsi Riau, SKPD Kabupaten/Kota, Swasta dalam hal ini dihadiri oleh PT. IKPP, dan Forum DAS Riau. Dalam memahami analisis *stakeholder* dalam formulasi perumusan Raperda ini dapat dilihat dari tingkat ketertarikan *stakeholder*, pengaruh kepentingan *stakelder* dan identifikasi *stakeholder*.

1. Tingkat ketertarikan *stakeholder*

Dalam proses perumusan kebijakan di daerah dalam pengelolaan DAS harus melibatkan aktor-aktor terkait, hal ini didasari oleh cakupan DAS Riau yang meliputi DAS Siak, DAS Kampar, DAS Indragiri, dan DAS Rokan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dalam Pengelolaan DAS harus melibatkan setiap aktor yang terkait dalam Pengelolaan DAS. Dilihat dari tingkat ketertarikan perumusan kebijakan Raperda Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari stakeholder yang hadir dalam proses perumusan Raperda.

Proses perumusan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan pembahasan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 17 Juli 2014, adapun kegiatan Panitia Khusus yaitu;

Tabel 1.2
Kegiatan Pembahasan Raperda Provinsi Riau tentang Pengelolaan DAS pada 24 Juni 2014 s/d 17 Juli 2014

No	Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa, 24 Juni 2014	Persetujuan Dewan tentang Raperda DAS menjadi Perda DAS dalam Rapat Paripurna Dewan
2.	Selasa, 24 Juni	Rapat Komisi B tentang Pembentukan

	2014	Pansus Pengelolaan DAS
3.	Selasa, 24 Juni 2014	Rapat Interen I Pansus Pengelolaan DAS
4.	Rabu s/d Jum'at, 25 s/d 27 Juni 2014	Studi banding ke Provinsi Sumatera Selatan dari tanggal 25 s/d 27 Juni 2014
5.	Senin, 30 Juni 2014	Rapat Interen II Membahas hasil dari kunjungan studi banding ke Provinsi Sumatera Selatan bersama Tenaga Ahli
6.	Kamis s/d sabtu, 3 s/d 5 Juli 2014	Studi banding ke Provinsi Sulawesi Utara dari tanggal 3 s/d 5 Juli 2014
7.	Jum'at, 4 Juli 2014	Rapat Interen III membahas hasil dari kunjungan studi banding ke Provinsi Sulawesi Utara bersama Tenaga Ahli
8.	Selasa, 8 Juli 2014	Pembahasan dengan Biro Hukum Provinsi Riau, SKPD terkait, dan Balai Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan
9.	Kamis, 10 Juli 2014	Pembahasan dengan beberapa Perusahaan, Ormas, LSM terkait dengan pengelolaan DAS
10.	Kamis, 10 Juli 2014	Pembahasan dengan SKPD terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau
11.	Kamis, 14 Juli 2014	Rapat kerja dalam rangka harmonisasi draf Raperda dengan Kanwil Kemenkumham Riau
12.	Kamis, 17 Juli 2014	Rapat konsultasi Pansus dengan Pimpinan dan Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau
13.	Senin, 21 Juli 2014	Rapat Paripurna pengesahan Raperda Pengelolaan DAS

Sumber: Laporan Panitia Khusus tentang Pengelolaan DAS tahun 2014

Ketertarikan *stakeholder* dalam pembahasan Raperda yang telah dilakukan mendapat respon yang kurang, yang dilihat dari kurangnya partisipasi *stakeholder* dalam menghadiri pembahasan Raperda yang dilakukan. Pembahasan yang dilakukan pada 8 Juli 2014 dalam pembahasan ini yang diundang yaitu Biro Hukum Provinsi Riau, SKPD terkait, dan Balai Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan, *stakeholder* yang hadir meliputi Dinas PU Prov. Riau, Disbun Prov. Riau, Biro Hukum, Pada kamis 10 Juli 2014, pembahasan dilakukan dengan beberapa Perusahaan, Ormas, LSM terkait dengan pengelolaan DAS,

yang diundang dalam pembahasan ini yaitu PT IKPP, PT RAPP, PT. Pertamina EP Asset 1 Field Lirik, PT Medco Energy Persada, PT Madu Koro, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Putra Riau Perkasa, PT Pusaka Megah Bumi Nusantara, PT Mema Unggul. Sedangkan yang ikut menghadiri pembahasan Raperda hanya dari satu perusahaan yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP). Selanjutnya dihari yang sama pada kamis 10 Juli 2014, dilakukan pembahasan dengan SKPD terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Riau, yang diundang dalam pembahasan ini yaitu Walikota/Bupati se Riau, namun yang menghadiri pembahasan ini yaitu hanya satu Kabupaten yaitu Rokan Hulu dari seluruh Kabupaten se Riau, yang hadir dalam pembahasan yaitu dari BLH Kabupaten Rokan hulu dan Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan hulu.

Rendahnya partisipasi dari SKPD terkait dalam menghadiri pembahasan Raperda tentang Pengelolaan DAS dikarenakan kurang menganggap penting DAS bagi kehidupan. Di samping Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing SKPD dalam pengelolaan DAS, juga terdapat kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan DAS yang termuat dalam Raperda tentang Pengelolaan DAS. Sehingga sangat penting bagi SKPD dalam mengahdiri hearing untuk memahami serta memberikan masukan-masukan terkait pengelolaan DAS.

2. Pengaruh kepentingan stakeholder

Setiap *stakeholder* dalam pengelolaan DAS tidak terlepas dari kepentingan masing-masing yaitu terkait Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing *stakeholder*. Aktor terkait ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu aktor Negara (eksekutif dan legislatif), swasta dan masyarakat. Aktor Negara dalam hal ini legislatif kepentingannya dalam DAS yaitu sebagai inisiator lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau dalam Pengelolaan DAS. Kepentingan eksekutif dalam hal ini SKPD terkait dalam DAS dapat dilihat pada; Kepentingan BLH dalam pengelolaan DAS yaitu sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2003

tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai Siak Provinsi Riau. Dalam hal ini peran BLH yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas air di sungai. Kepentingan Bappeda Provinsi Riau dalam Pengelolaan DAS yaitu dalam membuat perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Riau yang terkait dengan persoalan DAS. Kepentingan Dinas Kehutanan yaitu pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian bidang kehutanan. Kepentingan swasta dalam DAS dapat dilihat pada keberadaan perusahaan disekitar DAS yang membuat kerusakan sumberdaya DAS akibat kegiatan usaha yang dilakukan. Kepentingan masyarakat dalam hal ini dilihat pada keberadaan masyarakat yang tinggal di wilayah DAS. Aktor masyarakat dalam hal ini di fokuskan pada aktor-aktor terkait pengelolaan DAS yang juga memiliki kepentingan terhadap DAS. Namun dalam pelaksanaannya pembahasan Raperda yang dilakukan kurang dilibatkan, salah satunya Forum DAS Siak yang telah lama berdiri jauh sebelum lahirnya inisiatif Raperda DAS dari Komisi B ini juga tidak diikutsertakan dalam pembahasan Raperda tentang Pengelolaan DAS.

Dalam perumusan Raperda setiap *stakeholder* yang hadir dalam *hearing* pembahasan dapat memberikan masukan-masukan terhadap draft Raperda. Masukan-masukan yang diberikan tidak terlepas dari kepentingan masing-masing *stakeholder* dalam pemanfaatan DAS. Untuk menjangkau seluruh aspirasi masyarakat di DAS Provinsi Riau, maka dalam perumusan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan DAS harus melibatkan setiap *stakeholder* yang berkaitan dan kepentingan dengan DAS, sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat bersifat komprehensif.

3. Identifikasi *stakeholder*.

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, dukungan mayoritas ini selanjutnya akan diadopsi dalam Raperda tentang

Pengelolaan DAS ini. Dalam menyusun Raperda tentang Pengelolaan DAS banyak alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh *stakeholder* saat *hearing* pembahasan yang dilaksanakan. Setiap *stakeholder* yang hadir diberikan ruang untuk memberikan masukan terhadap Raperda tentang Pengelolaan DAS baik secara langsung atau secara tidak langsung, dari masukan-masukan yang diberikan oleh *stakeholder*, masukan-masukan yang mendapat dukungan mayoritas akan diadopsi dalam Raperda tentang Pengelolaan DAS.

Identifikasi *stakeholder* dalam proses pembuatan Raperda tentang Pengelolaan DAS setiap *stakeholder* ini dilibatkan dalam pembahasan *hearing* yang dilaksanakan di DPRD Komisi B Provinsi Riau. Pada pelaksanaannya setiap aktor ini sifatnya memberikan masukan-masukan yang berupa catatan-catatan saat *hearing* terhadap draft Raperda. Masukan-masukan yang diberikan oleh *stakeholder* dilakukan secara langsung saat pembahasan dilaksanakan, namun tetap memberikan ruang diluar pembahasan apabila dianggap perlu memberikan masukan terhadap Raperda. Kurang maksimalnya masukan-masukan yang diberikan *stakeholder* dalam penyempurnaan draft Raperda tentang Pengelolaan DAS ini terkait dengan waktu yang terlalu cepat karena adanya target di DPRD untuk menyelesaikan Raperda ini.

SIMPULAN

Dalam memahami analisis *stakeholder* dalam formulasi perumusan Raperda ini dapat dilihat dari tingkat ketertarikan *stakeholder*, pengaruh kepentingan *stakeholder* dan identifikasi *stakeholder*. Ketertarikan *stakeholder* dalam pembahasan Raperda yang telah dilakukan mendapat respon yang kurang, yang dilihat dari kurangnya partisipasi *stakeholder* dalam menghadiri pembahasan Raperda yang dilakukan. Pengaruh kepentingan *stakeholder* dalam formulasi kebijakan pengelolaan DAS dapat dilihat dari masukan-masukan yang diberikan saat pelaksanaan *hearing*, hal ini tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing *stakeholder*.

Identifikasi *stakeholder* dalam proses pembuatan Raperda tentang Pengelolaan DAS setiap *stakeholder* ini dilibatkan dalam pembahasan *hearing* yang dilaksanakan di DPRD Komisi B Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- C. Asdak, "Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai," in Gadjah Mada University Press Yogyakarta, no. Yogyakarta, 2010
- Laporan Akhir Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau, "Draft Rencana Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu," 2014.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, "Laporan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Daerah aliran Sungai," 2017.
- P. Edi suharto, "Analisis kebijakan publik," in Analisis kebijakan publik, bandung: Alfabeta, 2012.
- S. Kusumanegara, "Model dan aktor dalam proses kebijakan publik," in Model dan aktor dalam proses kebijakan publik, Yogyakarta: Gava Media, 2010
- Agustinus subarsono, "Kebijakan publik dan pemerintahan kolaboratif," in Kebijakan publik dan pemerintahan kolaboratif, Yogyakarta: Gava Media, 2016
- Alviya, E. Yosefi Suryandari, R. Maryani, and Z. Muttaqin, "Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung," J. Penelit. Sos. dan Ekon. Kehutan., vol. 13, no. 2
- N. Nurtjahjawilasa, H. Kartodihardjo, D. R. Nurrochmat, and A. Justianto, "Stakeholder Analysis on Forestry Human Resources Management and Development," J. Anal. Kebijak. Kehutan., vol. 12, no. 3
- A. Chairil Ichsan, R. Soekmadi, S. Adiwibowo, and C. Kusmana, "Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan Model Desa Konservasi Di Taman Nasional Gunung Rinjani," J. Anal. Kebijak. Kehutan., vol. 14, no.1
- R. Blackman, "Project Cycle Management". Roots : Resourcing Organizations with Opportunities for Transformation and Sharing. Tearfund., Project Cycle Manag. Roots Resourcing Organ. with Oppor. Transform. Sharing. Tearfund., 2003.
- R. S. S. Tsuraya Annisa Salsabila, "Analisis Stakeholder (Aktor Kebijakan) dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang," Anal. Stakehold. (Aktor Kebijakan) dalam Pengemb. Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang.